

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil bertahan dan memperkuat dominasinya selama 32 tahun di NKRI. Melalui serangkaian langkah yang terencana dan berkelanjutan, kestabilan politik dan keamanan menjadi target utama untuk diatasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama pasca peristiwa politik yang menggemparkan pada tahun 1965. Upaya ini dipandang sebagai langkah krusial dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Sebagaimana diungkapkan Ali Moertopo, tokoh penting pada era tersebut, stabilitas politik dan keamanan nasional dianggap sebagai landasan fundamental yang tidak dapat diganggu gugat untuk mencapai kemajuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat landasan stabilitas, pemerintahan Orde Baru berharap mampu sebagai jawaban atas permasalahan yang tidak kondusif pada kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial di Indonesia.¹

Selama periode 1966-1980, merupakan tahap penting dalam konsolidasi rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Kemunculan Jenderal Soeharto sebagai pengganti Soekarno menjadi peristiwa sentral dalam perubahan dinamika politik pasca-peristiwa 1965. Meskipun demikian, reformasi awal yang diinisiasi oleh Jenderal Soeharto belum mencapai tingkat signifikansi yang memadai dalam mengubah arah kebijakan secara substansial.² Melihat di tahun 1945-1965 menjadi awal berubahnya perekonomian Indonesia yang diakibatkan dari penyelenggaraan ekonomi dibebankan pada kegiatan domestik di

¹ Moertopo, Ali. (1983). *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS. Hlm 26-28

²Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.

tengah-tengah keadaan krisis politik yang sedang dialami dominasi peran pemerintah melalui BUMN-BMUN dalam penerapan sistem ekonomi kala itu menjadikan sistem ekonomi yang dilaksanakan condong kepada sistem ekonomi sosial sehingga tidak mendapatkan keefisienan dari hasilnya tersebut.³

Kemajuan ekonomi memainkan peran utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan sebuah negara. Di Indonesia, masa pemerintahan Presiden Soeharto selama periode Orde Baru menjadi momentum penting di mana pencapaian signifikan dalam sektor ekonomi berhasil diraih. Kebijakan Pembangunan Ekonomi menjadi langkah-langkah yang diterapkan untuk memajukan ekonomi Indonesia tersebut. Kebijakan diartikan sebagai sebuah ketetapan yang dilaksanakan terus menerus secara stabil dan konsisten yang mengikut sertakan segala elemen penciptanya (pemerintah sebagai pencetus) dan masyarakat sebagai pelaksana. selain itu kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan, ataupun target tertentu.⁴ selain itu arti pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses yang memberikan dampak pendapatan per kapita masyarakat dalam kurun waktu yang lama, yang kemudian diikuti oleh perubahan pada atribut penting masyarakat, terutama yang berkaitan dengan inovasi, pola pikir, dan fondasi.⁵ Pembangunan

³ Udiyana, I. B. G., Pradnyana, I. G. G. O., & Astini, N. N. S. (2008). Struktur dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru. In *Forum Manajemen*. Hal 41

⁴ Badan Kebijakan Fiskal. (2018). *Kebijakan Multilateral Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hal. 173

⁵ Rapana, Patta & Zulfikri Sukarno. (2017). *Ekonomi Pembangunan*, Makassar: CV Sah Media. Hal. 1.

ekonomi berarti hasil akhir dari berbagai faktor produksi yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia serta modal.⁶

Pada akhir tahun 1965, kampanye militer yang bertujuan menumpas pemberontakan G-30-S/PKI tampaknya telah selesai. Meski demikian, belum ada indikasi Presiden Soekarno berniat memenuhi komitmennya untuk mengatasi peristiwa ini melalui jalur politik. Akibatnya, gejolak politik semakin memuncak sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno.⁷ Belum lagi dengan semakin di perparahnya dengan keadaan inflasi yang mnyentuh angka 650% sehingga timbul krisis ekonomi berdampak pada kesjahteraan masyarakat yang semakin merosot.⁸ Beberapa kebijakan yang dipimpin oleh pejabat tinggi negara dalam mengatasi segala permasalahan nasional pun dilakukan namun hal itu justru membuat rakyat memandang kebijakan tersebut tidak menjawab aspirasi rakyat, ketidakpuasan masyarakat yang menumpuk itu menyebabkan meledaknya unjuk rasa yang dilakukan dari elemen cendikiawan, pelajar dan para mahasiswa.

Pada sidang paripurna oleh Kabinet Dwikora yang diselenggarakan di Bogor saat 6 Oktober 1965, oleh Soekarno menetapkan kebijakan terkait menindak lanjuti penyelesaian permasalahan G-30-S/PKI. Melalui perintah presiden diturunkan kebijakan: *“Bahwa aspek-aspek gerakan 30 September akan diselesaikan sendiri oleh presiden; aspek militer administratif diserahkan penyelesaiannya kepada Mayor Jenderal Pranoto, Pelaksana Tugas sehari-hari Men/Pangad, sedangkan penyelesaian aspek militer teknis*

⁶ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2005), Hal. 61.

⁷Christianto Wibisono, *Aksi-Aksi Tritura Kisah Sebuah Partnership*, 1970, hlm. 3

⁸ Harian Angkatan Bersendjata, 14 Desember 1965, dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang dan Zaman Republik VI

*masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto”*⁹ Para demonstran mendesak agar masalah ini diselesaikan dengan cepat, tetapi hingga pembentukan front Pancasila terhitung dari 26 Oktober 1965, Presiden Soekarno belum berhasil memenuhi keinginan dari permintaan mereka. hingga pada 12 Januari 1966, dengan membawa tuntutan "Tritura" serta pembubaran PKI demonstran mendatangi DPR-GR.¹⁰

Tensi konflik antara Simpatisan Soekarno dan Soeharto meningkat, dan DPR-GR menyimpulkan bahwa situasi ini perlu diakhiri sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengeluarkan pernyataan tujuan beserta peringatan yang meliputi usulan kepada pimpinan prosedum kabinet Ampera menyegerakan rapat luar biasa MPRS pada tanggal 3 Febuari 1967 dan pada tanggal 20 Febuari 1967, Soeharto diberikan kekuasaan melalui mandat presiden Soekarno sejalan dengan hasil rapat luar biasa MPRS yang menegaskan penyerahan kekuasaan. Melalui pengumuman nomor XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai presiden. Dengan langkah-langkah yang diatur oleh MPRS, konflik politik yang tidak stabil tersebut akhirnya berakhir secara sesuai dengan aturan konstitusional .¹¹

Walaupun penyelesaian perselisihan berhasil, namun proses pembentukan Orde Baru masih belum lengkap. Mencapai ketergantungan publik membutuhkan waktu dan proses yang tepat untuk mencapai stabilitas dinamis yang diperlukan agar interaksi dipercepat. Untuk meningkatkan interaksi tersebut, diperlukan

⁹ Sekneg Republik Indonesia. (1980). *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*: Jakarta. Hal 51

¹⁰ Syahbuddin. (2017). Upaya Soeharto Memotong Pilar-Pilar Kekuasaan Soekarno. *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 7. No. 1. Hlm 1-11.

¹¹ Badrika, I Wayan. (2006). *Sejarah Untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga. Hal.123

usaha untuk membangun kembali kehidupan politik berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dengan perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dimulai era baru dalam sejarah Orde Baru.¹²

Periode awal pemerintahannya dikenal dengan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi krisis dan memulihkan stabilitas di Indonesia. Presiden Soeharto dipilih menjadi Presiden RI dengan mewarisi keadaan ekonomi yang secara nasional mengalami krisis.¹³ Presiden Soeharto menginisiasi pembangunan Indonesia melalui pendekatan Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari Stabilitas, Pembangunan/Pertumbuhan, dan Pemerataan Pembangunan. Visinya adalah Indonesia akan mencapai fase take off melalui dua tahap Pembangunan Jangka Panjang yang dilaksanakan secara bertahap melalui skenario Pelita selama periode pembangunan lima tahun.¹⁴ Melalui kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru atas pemikiran presiden Soeharto memberi dampak positif maupun negatif pada sektor ekonomi, sosial dan pendidikan .

Berbagai peristiwa sejarah tidak terjadi secara spontan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran, karakter, keyakinan, ajaran, dan tindakan individu yang berperan penting pada masanya. Menurut pendapat jurnalis Oriana Fallaci dalam karyanya yang terkenal, *"Interview with History"*, ia menyatakan bahwa sejarah merupakan hasil dari kontribusi banyak orang, namun hanya sedikit yang mampu menonjol karena mereka dilahirkan pada saat yang tepat dan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikannya.¹⁵ Kepemimpinan

¹² *Ibid*, Hal. 123.

¹³ Abdul Rohman. (2015). *Wasiat Kebangsaan Mewujudkan Indonesia Tinggal Landas*. Jakarta: Public Policy Institute (PPI). Hal 5

¹⁴ *Ibid*; Hal 7-8.

¹⁵ Pusat Data Analisa Tempo. (1998). *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H. Nasution*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti. Hal 2

Soeharto sebagai presiden pengganti Soekarno merupakan hal yang menarik untuk disimak. Terutama pemikirannya dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia saat itu.

Dalam meneliti pemikiran Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada era pemerintahan Orde Baru 1966-1974, penting untuk memahami bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa itu tidak hanya menciptakan dampak langsung pada kondisi ekonomi, tetapi juga berdampak pada struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat. Gagasan-gagasan ekonomi Soeharto tidak hanya mencerminkan visi ekonomi negara semata, tetapi juga merupakan refleksi dari ideologi politik dan nilai-nilai yang dianut oleh rezim Orde Baru. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikiran ekonomi Soeharto perlu dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan budaya yang melingkupinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul penelitian **“Analisis Pemikiran Soeharto dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Pemerintahan Orde Baru 1966 - 1974”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada pemikiran dari tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh presiden Soeharto selama periode pertama di era Orde Baru menjabat sebagai presiden (1966-1974). Adapun permasalahan yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia sebelum 1966?
2. Bagaimana pemikiran Soeharto dalam membangun perekonomian Indonesia 1966-1974?
3. Bagaimana dampak kebijakan perekonomian Soeharto terhadap pembangunan Indonesia 1966-1974?.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup cakupan penelitian ini dibatasi oleh spasial dan temporal, mengingat rumitnya permasalahan yang sedang diteliti. Pembatasan ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih terfokus terhadap isu-isu inti untuk mengatasi masalah penelitian secara mendasar.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1966 karena setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto memainkan peran yang sangat signifikan dalam peristiwa politik Indonesia. Diantaranya saat ia menjadi pejabat Presiden hingga diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Batasan waktu akhir penelitian ini adalah Tahun 1974 di mana pada tahun 1974 menjadi akhir kebijakan periode pertama dalam pemerintahan Soeharto sebagai presiden pada Era Orde Baru di Indonesia. Penelitian ini hanya berfokus

pada Pemikiran Soeharto terhadap kebijakan-kebijakan pada Era Orde Baru selama periode pertama menjabat sebagai presiden di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1966
2. Untuk mengetahui pemikiran Soeharto dalam membangun perekonomian Indonesia 1966-1974.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan perekonomian Soeharto terhadap pembangunan Indonesia 1966-1974.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pemikiran politik Soeharto selama era Orde Baru, yang dapat meningkatkan wawasan penulis terhadap sejarah politik Indonesia.

2. Bagi Universitas Jambi

Untuk memperkaya sumber bacaan yang bermanfaat bagi pembaca, termasuk di Universitas Jambi dan di luar, khususnya terkait dengan analisis pemikiran Soeharto dalam upaya pembangunan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 - 1974.

3. Bagi Pembaca

Skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran politik Soeharto dan dinamika politik Indonesia pada periode Orde Baru, dan dapat menjadi referensi penting untuk studi lanjutan, penelitian lebih lanjut, atau sebagai sumber informasi bagi mereka yang tertarik pada sejarah politik Indonesia.

4. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang pemikiran Soeharto Pada Era Pemerintahan Orde Baru 1966 -1974

1.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang mengkaji pemikiran Soeharto dalam pembangunan ekonomi pada era pemerintahan Orde Baru 1966-1974 telah menjadi subjek penelitian yang menarik minat untuk diteliti, namun masih belum banyak yang menelitinya. Pada Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Soeharto dalam pembangunan ekonomi pada era pemerintahan Orde Baru (1966-1974). Penelitian ini menarik minat sejumlah peneliti dalam bidang sejarah ekonomi Indonesia. Beberapa peneliti sebelumnya telah menyelidiki berbagai aspek terkait, namun penelitian ini akan lebih difokuskan pada aspek-aspek spesifik yang berkaitan dengan pemikiran Soeharto dalam pembangunan ekonomi pada periode tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang mengacu pada berbagai sumber.

Penelitian yang menggunakan rujukan ini bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penelitian ini, peneliti

menggunakan sejumlah jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Namun, setelah meneliti berbagai sumber tulisan, terdapat beberapa karya seperti skripsi, dan jurnal yang membahas tema yang sama, yang dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan untuk mengevaluasi kedalaman permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mufid Fareza pada tahun 2016 yang berjudul “Dampak Kebijakan Perekonomian Era Orde Baru terhadap Pembangunan di Indonesia” Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yaitu metode studi kepustakaan yang meliputi identifikasi, penjelasan dan analisis sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan yang dilakukan meliputi pemilihan judul, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, prioritas utama adalah perbaikan sektor ekonomi dan politik, dengan perhatian khusus pada pemerataan pembangunan. Program utama yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, menurunkan angka kematian bayi, dan mendorong pertumbuhan sektor industri. Selain itu, keberhasilan juga terlihat dalam pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Adinda Afriyenti pada tahun 2020 yang berjudul “Pemikiran Ali Moertopo dalam Strategi Pembangunan Orde Baru (1971-1984)” Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran penting Ali Moertopo pada

¹⁶ Fareza, M. (2016). Dampak kebijakan perekonomian era orde baru terhadap pembangunan di Indonesia. *Pendidikan Sejarah, UPY*. Fareza, M. (2016). Dampak kebijakan perekonomian era orde baru terhadap pembangunan di Indonesia. *Pendidikan Sejarah, UPY*.

pemerintahan Orde Baru, khususnya mengenai pemikirannya mengenai strategi pembangunan nasional. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perjalanan hidup Ali Moertopo dan mendeskripsikan pemikirannya mengenai strategi pembangunan pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berdasarkan pendekatan Louis Gottschalk, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Heuristik, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah; 2) Verifikasi (kritik sumber), yang melibatkan kritik eksternal dan internal untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber; 3) Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diverifikasi, dilanjutkan dengan analisis untuk mengungkap berbagai peristiwa; 4) Historiografi, yaitu penulisan hasil kajian sejarah.

Ali Moertopo, seorang Jenderal Angkatan Darat, dikenal dengan pemikiran cemerlangnya di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi. Salah satu kontribusi utamanya adalah gagasan strategi kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam buku *Landasan Pemikiran 25 Tahun Percepatan Modernisasi*. Pemikirannya mencakup berbagai aspek, seperti ideologi nasional, analisis kondisi masyarakat, dwifungsi ABRI, serta strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada percepatan modernisasi. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi tertentu dalam pembangunan ekonomi, agar rencana pembangunan dapat berjalan lancar. Konsep utamanya meliputi stabilitas nasional, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta tanggung jawab dan keamanan nasional.¹⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ika Frelia dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Peranan Soeharto dalam Membangun Perekonomian di Indonesia pada Masa

¹⁷ ADINDA AFRIYENTI, . (2020) *PEMIKIRAN ALI MOERTOPO DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN ORDE BARU (1971-1984)*. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Orde Baru (1966-1998)”. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Presiden Soekarno melepaskan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968. Sejak 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dalam upayanya mengatasi krisis ekonomi, politik dan pemerintahan, Presiden Soeharto mencanangkan program pembangunan lima tahun (Repelita). Hingga Repelita ke-6, pemerintahannya berhasil memperbaiki keadaan perekonomian, mencapai stabilitas politik, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda berbagai sektor di Indonesia. Soeharto mencoba mengatasinya dengan merevisi APBN, menunda perjalanan dinas pejabat ke luar negeri, dan menaikkan tarif dasar listrik. Upaya ini tidak berhasil karena besarnya beban utang luar negeri dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis yang terus memburuk—baik di bidang ekonomi, keuangan, dan kepemimpinan—mendorong masyarakat dan mahasiswa untuk berdemonstrasi, menuntut reformasi di berbagai sektor dan meminta Soeharto lengser dari jabatannya. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri karena kehilangan kepercayaan masyarakat. Pengunduran diri ini menjadi tonggak dimulainya era reformasi di Indonesia.¹⁸

Penelitian yang membahas mengenai Pemikiran Soeharto Pada Era Pemerintahan Orde Baru 1966 -1974 belum banyak yang menulis. Jika ada yang menyinggung, tapi untuk waktu, tempat, serta karakteristiknya sangatlah berbeda.

¹⁸ Frelia, I., & Anggar Kaswati, S. (2020). Peranan Soeharto dalam Membangun Perekonomian di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 1(1).

Sedangkan fokus penulis pada penelitian ini menempatkan pemikiran Soeharto dalam konteks perekonomian, serta dampak-dampaknya terhadap perkembangan Indonesia tahun 1966-1974. Analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pemikiran ekonomi Soeharto mempengaruhi arah pembangunan ekonomi Indonesia dan masyarakatnya guna Penulis memperluas cakupan penelitian yang telah ada dengan mengumpulkan sumber-sumber tambahan yang relevan dari berbagai sumber dan media. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam, serta untuk memperkaya analisis yang telah dilakukan dalam penulisan sebelumnya. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan data tambahan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih berharga dan mendalam dalam topik penelitiannya.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian tentang konsep sejarah pemikiran menyelidiki hubungan dan ungkapan ide-ide di masa lampau. Pada dasarnya, ini menggali cara pemikiran yang dinyatakan melalui karya-karya tertulis seperti buku, esai, atau bahkan pamflet, terutama yang menunjukkan pemikiran yang kompleks dan reflektif. Seiring berjalannya waktu, ruang lingkupnya semakin meluas untuk mencakup ide-ide yang tidak secara resmi terdokumentasi, seperti yang terlihat dalam perbincangan tentang kebijaksanaan lokal. Oleh karena itu, konsep sejarah pemikiran atau sejarah intelektual adalah koleksi bukti-bukti historis tentang bagaimana ide-ide atau pemikiran manusia memengaruhi perkembangan peristiwa

sejarah¹⁹. Menurut Mestika Zed dalam tulisannya yang berjudul "Apakah Sejarah Pemikiran", sejarah pemikiran, dalam interpretasi yang paling menyeluruh antara lain:

- a. Sejarah kemunculan pemikiran manusia muncul dari para pemikir di berbagai bidang seperti filsafat, seni, sastra, politik, dan sains. Orang-orang ini mewariskan warisan intelektual mereka dalam berbagai bidang, mencakup bidang pengetahuan teoritis dan akademis.
- b. Analisis dampak dari berbagai aspek pemikiran mereka terhadap dinamika sosial pada periode tersebut.
- c. Analisis mengenai penyebaran serta pengaruh pemikiran dalam sejarah dan dampaknya terhadap faktor-faktor *non-intelektual*, atau hal-hal yang bersifat kondisional.²⁰

Kuntowijoyo dalam bukunya "Metodologi Sejarah Edisi Kedua", sejarah pemikiran dibagi menjadi dua aspek: pemikiran teoritis (politik, filsafat, agama, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya) dan pemikiran praktis (pengetahuan sehari-hari dan akal sehat).²¹

Sejarah pemikiran /intelektual bisa disebutkan sebagai pokok masalah data apa saja yang ditinggalkan oleh pemikiran manusia. Sebagai contoh, Masa orde baru yang dikenal sebagai tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia kala itu. Dalam konteks yang terbatas, sejarah pemikiran menelusuri proses dan pelaku pembentukan pemikiran dalam perspektif sosiologi retrospektif. Cabang sejarah intelektual membahas pencetus, penyebaran, dan ekspresi budaya,

¹⁹ Zed, M. (2015). Apakah sejarah pemikiran?. Padang: Universitas Negeri Padang. Hal 1-2

²⁰ *Ibid.*, hlm 2

²¹ H.M. Yakub. (2018) Sejarah Sosial Intelektual Islam Zainal Arifin Abbas (1912-1979 M) "Perspektif Sosio-Kultural" . *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 22 (1). Hal.2

terutama propaganda. Pada era awal Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan, termasuk strategi pembangunan yang mengutamakan Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan.

Sejarah Pemikiran melampaui lingkup para intelektual atau sekadar permukaan, tetapi juga merangkum aktivitas nyata masyarakat bawah. Hal ini juga mencakup analisis terhadap pemikiran yang mempengaruhi peristiwa bersejarah, mempertimbangkan konteks sejarah dan implikasinya terhadap masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia, Soeharto melibatkan lima ekonom lulusan Universitas Berkeley, termasuk Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Subroto, yang bertanggung jawab merancang kebijakan ekonomi.²² Di awal pemerintahan Orde Baru, program yang dijalankan pemerintahan semata-mata diarahkan sebagai usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama dalam pemberantasan inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan jangka panjang dan secara bertahap yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keberhasilan Soeharto merubah Indonesia dari negara miskin beranjak ke negara industri baru menjadikan Soeharto mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan.

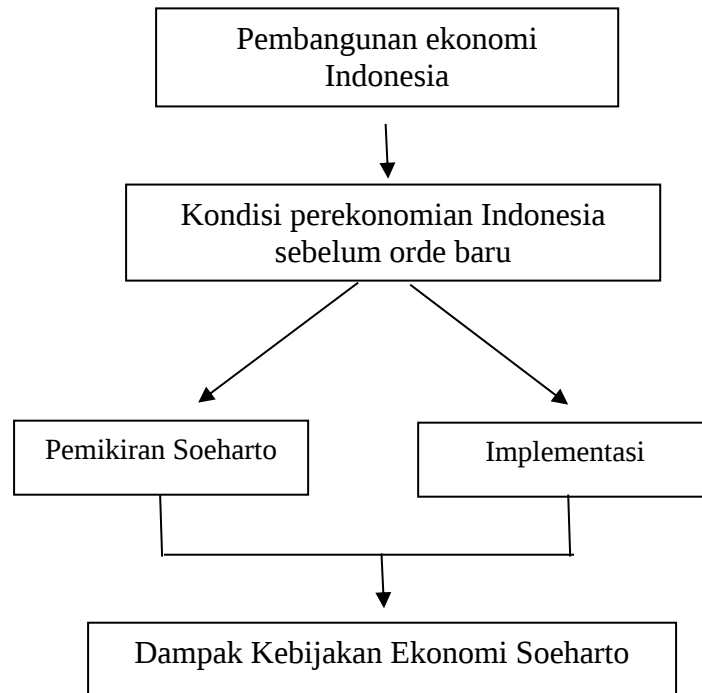
Studi tentang sejarah intelektual tidak hanya mencakup pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi juga mencakup latar belakang sejarah di mana gagasan-gagasan muncul, berkembang, dan berdampak pada masyarakat yang lebih luas. Ini menggali keterhubungan antara filsuf,

²² Leo Agung. *Sejarah Intelektual*. Yogyakarta: Ombak, 2016. Hlm.216-217

intelektual, dan pengalaman hidup dari banyak individu yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Akibatnya, sejarah intelektual tidak hanya sekedar akademisi atau narasi sejarah yang dangkal, tetapi juga mencakup komunitas akar rumput dan kontribusi nyata mereka. Suharto, yang dikenal karena kedekatannya dengan kalangan bawah, terlibat dalam inisiatif-inisiatif praktis.

Hal itu dikarenakan latar belakangnya yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pertanian membuatnya paham mengenai keadaan masyarakat petani. Hal itu terbukti dari sejumlah kebijakannya yang mensejahterakan pertanian Indonesia. Sebagai negara agraris Dalam struktur ekonomi yang bertumpu pada pertanian, hasil pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Langkah-langkah yang diambil termasuk program Bimas dan Inmas, yang meliputi peningkatan infrastruktur irigasi, penggunaan bibit unggul PB-5 dan PB-8, serta penyediaan pupuk, obat-obatan, dan penyuluhan teknis tentang penanaman padi.²³

²³ Djoened, M., & Poesponegoro, N. N.. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia IV: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 571



Bagan 1.1 Kerangka Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*methodos*”, sebuah istilah Yunani yang berarti jalan menuju sesuatu, dipadukan dengan “*logos*”, yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi dapat dipahami sebagai sarana untuk memperoleh atau menyebarkan pengetahuan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan Studi Pustaka. Metode ini melibatkan serangkaian tahapan, termasuk tahap Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.²⁴

²⁴ Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Historia Utama Press. hal 125

1. Heuristik

Tahap awal adalah heuristik, di mana peneliti mengumpulkan sumber sejarah untuk memperoleh data, jejak, dan informasi yang relevan. Ini mencakup identifikasi dan klasifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian sejarah. Peneliti mengumpulkan sumber yang relevan dengan cara mengunjungi perpustakaan universitas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta sumber dari Internet seperti Google Scholar, Perpustakaan Online, Arsip Online, dll.

Buku yang menjadi Sumber primer yang sesuai dengan penulisan ini yaitu berupa otobiografi yang berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. dan dokumen-dokumen penting lain seperti Kebijakan Presiden (Kepres: Teks Keppres Nomor 79 Tahun 1969) yang bisa di dapat dari Perpustakaan dan Arsip

Penulis juga memanfaatkan buku sebagai sumber informasi tambahan sebagai sumber sekunder:

1. Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia: Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru, Penulis Bustomi Hadjid Ronodirdjo, dkk
2. Jenderal Besar HM Soeharto: Mengukir Dua Momentum Penting Bagi Keselamatan Bangsa & Negara, penulis Drs. Bakri A.G. Tianlean
3. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik, Penulis Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia.

4. Wasiat Kebangsaan: Mewujudkan Indonesia tinggal landas : H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, 1967-1998, Penerbit Public Policy Institute (PPI)
5. Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana, Femi Adi Soempeno.
6. Pidato seoharto kepada Kabinet Ampera. "Sidang Paripurna:Strategi Pembinaan Orde Baru (Masalah-masalah Konsepsional)". 19 April 1967

Buku-buku ini didapat dari:

1. Toko online
2. Perpustakaan/Toko Buku
3. *Internet*

2. Kritik Sumber

Kritik terhadap sumber data adalah penelaahan informasi sejarah. Tahapan ini diperlukan untuk mengecek keaslian (otentisitas sumber infomrasi) dan kredibilitas informasi (kepercayaan) sumber.²⁵ Kritik sumber terutama dalam wujud dalam sumber tertulis memiliki aspek eksternal dan internal. Kritik internal digunakan untuk menyebarkan kebenaran informasi yang terkandung dalam suatu sumber. Dengan kata lain, peneliti atau diskusi perlu menilai sejauh mana fakta yang diperoleh dari sumber sejarah²⁶

Pada kritik intern peneliti melakukan pengecakan dari keaslian isi isi dari fakta yang ditemui dilapangan, yang dimana pada hal ini adalah sumber

²⁵ Koentowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya. hlm. 99-100.

²⁶ Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*". Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hal 65

primer, kritik ini dilakukan untuk memastikan kandungan atau substansi dari sumber-sumber yang digunakan, seperti otobiografi "Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya" yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., serta dokumen-dokumen penting lain seperti Keputusan Presiden (Keppres Nomor 79 Tahun 1969). Pada saat yang sama, sumber-sumber tersebut merupakan produk rekonstruksi sejarah yang mendukung informasi dalam menganalisis pemikiran Soeharto dalam pembangunan ekonomi pada era pemerintahan Orde Baru 1966–1974. Kritik ini mencakup evaluasi internal terhadap akurasi, relevansi, dan validitas sumber, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang arah kebijakan ekonomi yang diambil pada masa tersebut.

Sedangkan untuk Aspek eksternal meliputi berkaitan apakah informasi sumber tersebut merupakan informasi yang benar adanya.. Artinya kritik eksternal diperlukan guna mencari tahu keaslian sumber, sehingga informasi maupun sumber yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Pada kritik ekstern disini peneliti meyakini bahwa sumber primer yang digunakan yaitu otobiografi "Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya" yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., serta dokumen-dokumen penting lain seperti Keputusan Presiden (Keppres Nomor 79 Tahun 1969). Benar benar dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan buku otobiografi" Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya walaupun diterbitkannya memang bukan di ruang waktu penelitian ini yang dimana tahun 1966-1974 sedangkan terbitan buku otobiografi itu sendiri terbit pada 1989. Akan tetapi isi dari buku tersebut adalah memang hasil wawancara

yang dilakukan terhadap Soeharto mengenai selama masa pemerintahannya dia sebagai presiden, oleh karena itu hal ini juga mencakup periode 5 tahun pertama pemerintahan Soeharto tahun 66-74. Sedangkan pada kepres (Keppres Nomor 79 Tahun 1969) ini adalah sebuah dokumen arsip yang berbentuk digital yang didapat melalui Internet website online ANRI, dalam kepres tersebut keterangan tanggal kepres itu dikeluarkan adalah 14 Oktober 1969 dan ditanda tangani langsung oleh Soeharto. Oleh karena itu Peneliti meyakini bahwa sumber sumber yang telah disebutkan di atas dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap menklarifikasi makna dari temuan fakta-fakta sejarah berdasarkan informasi yang ditemukan. Seorang sejarawan bertugas mengungkap signifikansi sejarah dari bukti-bukti tersebut, yang memerlukan penjelasan karena bergantung pada informasi tambahan dari luar.²⁷ Peneliti berupaya menawarkan interpretasi atas sumber atau data yang diperoleh untuk menjabarkan secara spesifik kebijakan-kebijakan ekonomi pada awal periode pemerintahan Soeharto beserta dampaknya pada perkembangan ekonomi pada era tersebut.

4. Historiografi

Tahap historiografi adalah saat fakta dijelaskan dan dilakukan upaya rekonstruksi masa lalu guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Oleh karena itu, historiografi merupakan tahapan pelaksanaan

²⁷ *Ibid*, Hal 81

evaluasi mendalam yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi yang menarik.

Tahapan historiografi ini menekankan pentingnya observasi dan pengungkapan data dengan tingkat ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan karya yang presisi. Oleh karena itu, pengelolaan data harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi pengaruh subjektif. Namun unsur subjektivitas akan tetap ada dalam semua karya sejarah, karena sejarah pada prinsipnya dianggap sebagai penafsiran subjektif. Meskipun demikian, kontribusi tidak pernah sepenuhnya netral, namun akan tercermin sesuai dengan preferensi subyek yang menghasilkannya.²⁸

Dalam tahap historiografi, fakta-fakta diinterpretasikan dan diatur menjadi narasi sejarah yang kohesif. Sebagai hasilnya, proses tersebut memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Dengan pemahaman terhadap langkah-langkah tersebut, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa tujuan utama seorang sejarawan adalah menciptakan karya ilmiah yang memiliki nilai sejarah yang signifikan.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian. Bab ini disertai mengenai ketertarikan penulis dalam memilih permasalahan yang diangkat. Bab ini juga berisi rumusan masalah, fokus penelitian,

²⁸ Sartono Kartodirdjo, 1992: *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 62

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Kondisi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1966, yang membahas keadaan dan kebijakan ekonomi pada masa orde lama serta krisis ekonomi yang menjadi awal mula transisi pemerintahan orde lama ke orde baru.

BAB III : Pemikiran Soeharto dalam membangun perekonomian Indonesia tahun 1966-1974. Pada sub bab ini akan membahas profil singkat Soeharto mulai dari latar belakang hingga dominasi Soeharto di akhir pemerintahan Soekarno, serta pemikiran yang melandasinya dalam membangun perekonomian Indonesia.

BAB VI : Dampak kebijakan perekonomian Soeharto terhadap pembangunan Indonesia (1966-1974). Pada bab ini terdiri dari sub bab yang membahas implementasi kebijakan Soeharto serta respon dan dampak dari kebijakan tersebut.

BAB V : Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, dan saran.